

ANALISIS SUATU KEBIJAKAN TERHADAP TARIF DALAM PERANG DUNIA (Studi Kasus: Sektor Industri dan Perdagangan Internasional)

**Enjum Jumhana¹, Virda Sofiatul Husna², Hanum Febriana³, Okti Siti Awaliah⁴, Aat Nuraini
Agustin⁵, Yunengsih⁶, Putri Sari⁷**
jumhanad@gmail.com¹, virdahusna07@gmail.com², hanumfebriana01@gmail.com³,
okti6759@gmail.com⁴, aatnuraini@gmail.com⁵, ayusriningsih09@gmail.com⁶,
putri.sari1217@gmail.com⁷
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Kebijakan tarif bukan hanya sebagai suatu instrumen ekonomi untuk mengatur arus barang dan meningkatkan pendapatan negara saja, akan tetapi juga menjadi alat strategis dalam menghadapi konflik global. Dalam masa perang, tarif memiliki tujuan untuk melindungi industri domestik dari serbuan produk asing, memperkuat basis terhadap produksi nasional, menambah pemasukan negara guna membiayai perang, serta sebagai senjata diplomatik dan tekanan ekonomi terhadap negara musuh. Tarif juga dapat memengaruhi struktur perdagangan internasional dengan menciptakan blok perdagangan yang di lakukan secara tertutup dan menurunkan efisiensi global. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan tarif yang selektif, memberikan perlindungan pada sektor strategis, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta menjalin aliansi dagang yang mendukung posisi nasional. Dengan demikian, kebijakan tarif dalam masa perang dunia merupakan bagian dari strategi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan militer, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Tarif, Perang Dunia, Perdagangan Internasional.

ABSTRACT

Tariff policy is not only an economic instrument for regulating the flow of goods and increasing state revenues, but also a strategic tool in addressing global conflicts. During a national war, tariffs aim to protect domestic industries from the onslaught of foreign products, strengthen the domestic production base, increase state revenues to finance the war, and serve as a diplomatic and economic pressure tool against enemy countries. Tariffs can also affect the structure of international trade by creating closed trading blocks and reducing global efficiency. The government has a very important role in setting flexible tariffs, providing protection for strategic sectors, overseeing implementation policies, and establishing trade partnerships that support national positions. Thus, tariff policy during World War II was part of a multidimensional strategy that included economic, political, and military aspects, intending to maintain national sovereignty and resilience.

Keywords: *Tariff Policy, World War, International Trade.*

PENDAHULUAN

Perang dunia, baik Perang Dunia I (1914–1918) maupun Perang Dunia II (1939–1945), hal ini tidak hanya menjadi salah satu konflik militer berskala global saja, akan tetapi juga membawa berbagai dampak sistemik terhadap tatanan politik, sosial, dan ekonomi internasional. Salah satu aspek yang sangat penting ialah mengalami perubahan yang signifikan akibat perang ialah adanya suatu kebijakan ekonomi, khususnya ialah kebijakan tarif dan perdagangan internasional. Perang merupakan sebuah pertandingan yang di lakukan antara dua negara atau lebih, yang dapat melibatkan angkatan bersenjata, dengan memiliki tujuan akhirnya ialah dapat mengalahkan kontestan lain.

Dalam konteks ini, tarif tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen fiskal saja, akan tetapi juga sebagai salah satu alat yang strategis yang bertujuan untuk mengatur aliran

barang, melindungi industri dalam negeri dan juga memiliki tujuan untuk memperkuat posisi terhadap ekonomi negara selama masa perang dan juga rekonstruksi pascaperang. Kebijakan tarif selama era perang dunia ini akan mengalami transformasi yang kompleks. Transformasi merupakan suatu upaya yang memiliki tujuan untuk dapat memahami konsep atau analisis ilmiah tentang dunia, termasuk upaya melestarikan budaya lokal.

Di satu sisi, banyak sekali negara yang telah menerapkan proteksionisme dengan memiliki tujuan untuk melindungi sektor industrinya dari persaingannya yang berada di luar negeri, sekaligus untuk mendukung kebutuhan militer dan logistik nasional. Di sisi lain, negara yang bersekutu juga telah menggunakan suatu kebijakan tarif dan sanksi perdagangan sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap negara musuh, dengan harapan untuk dapat melemahkan kapasitas produksi dan distribusi lawan.

Dalam hal ini, adanya suatu kebijakan terhadap tarif juga menjadi suatu instrumen geopolitik yang tidak dapat terpisahkan dari strategi perang yang di lakukan secara keseluruhan. Adanya in strategis seperti baja, mesin, kimia, dan tekstil menjadi sektor yang sangat terdampak oleh fluktuasi tarif dan pengendalian perdagangan. Dalam praktiknya, pemerintah lebih cenderung guna menetapkan tarif yang sanagt tinggi terhadap barang impor yang dapat diproduksi dalam negeri guna mendorong swasembada industri. Selain itu, terjadi pula pembentukan blok terhadap perdagangan yang mengisolasi negara musuh dari akses pasar dan sumber daya penting.

Kebijakan tarif yang diberlakukan selama perang dunia ini turut mengubah pola hubungan dagang antarnegara, memunculkan ketimpangan distribusi sumber daya, serta guna mendorong munculnya poros ekonomi baru pascaperang. Misalnya, kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat engan melalui perundangan yang membahas tentang hal ini telah dapat memperburuk hubungan dagang internasional dan telah ikut berkontribusi terhadap kemerosotan ekonomi global yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan internasional menjelang perang dunia ke II.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tentang suatu kebijakan tarif yang dapat diberlakukan selama periode perang dunia dengan lebih berfokus kepada dampaknya terhadap sektor industri dan perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang dimana penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara meneliti dari data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian akan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang berada di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian yang telah dilakukan dengan mengkaji suatu kebijakan tentang tarif yang diberlakukan oleh negara yang terlibat dalam perang dunia I maupun perang dunia II, terutama terhadap suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk memengaruhi sektor industri yang di lakukan secara strategis dan aktivitas terhadap perdagangan antarnegara.

Penelitian ini melihat tentang bagaimana negara ini dalam menggunakan suatu kebijakan tarif sebagai alat politik dan ekonomi, yang bertujuan untuk mempertahankan kekuatan nasional, melindungi suatu industri domestik, serta guna mengendalikan impor dan ekspor terhadap barang yang penting selama perang ini berlangsung. Misalnya, dalam perang dunia ii, dimana salah satu negara telah menaikkan tarif masuk terhadap produk asing atau dengan melakukan embargo perdagangan terhadap negara musuh sebagai strategi perang ekonomi.

Embargo merupakan suatu tindakan yang di lakukan oleh suatu negara atau suatu kelompok negara yang memiliki tujuan untuk melarang perdagangan, terutama ekspor dan

impor barang tertentu, kepada atau dari negara lain dengan tujuan untuk menekan atau memaksa negara tersebut untuk dapat mengubah akan suatu kebijakan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dari adanya suatu kebijakan tarif dalam konteks kepentingan ekonomi dan strategi perang

Tarif merupakan sebuah uang yang dapat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu barang atau pelayanan. Tarif juga bisa dapat dipandang menjadi salah satu alat pemberian nilai kepada konsumen yang dapat memengaruhi citra produk dan keputusan pembelian. Sedangkan, kebijakan tarif merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi dari suatu negara, yang pada dasarnya ini dapat digunakan untuk mengenakan pungutan terhadap suatu barang yang masuk (impor) dari luar negeri.

Dalam konteks ini, tarif memiliki fungsi utama ialah sebagai salah satu alat proteksi industri dalam negeri, meningkatkan penerimaan negara, dan juga guna mengatur lalu lintas perdagangan. Namun, seperti pada masa perang atau konflik internasional ini, kebijakan dari suatu tarif menjadi salah satu alat strategis yang memiliki peran ganda, yang dimana bisa di gunakan sebagai instrumen ekonomi dan sekaligus menjadi suatu senjata diplomatik dalam pertarungan geopolitik dan geoekonomi global. Ada beberapa tujuan utamanya dapat di lihat dari berbagai sektor seperti :

1. Tujuan untuk ekonomi

Yang dimana tujuan untuk ekonomi ini ialah guna melindungi serta dapat memperkuat basis pada produksi domestik, yang dimana ini merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan tarif dalam masa perang ini ialah untuk melindungi industri domestik dari serbuan produk asing. Dalam situasi konflik global, negara akan lebih cenderung guna memperkuat kemandirian ekonominya dengan dapat memastikan bahwa sektor ini sangat strategis seperti industri pertahanan, pertanian, dan juga energi dapat bertahan dan berkembang tanpa terlalu bergantung pada impor. Tarif yang tinggi juga dapat dikenakan terhadap suatu barang dari negara musuh atau pesaing geopolitik, agar produk dalam negeri ini lebih kompetitif yang di lakukan secara harga dan dapat memenuhi kebutuhan populasi tanpa ketergantungan pada pihak luar.

2. Tujuan fiskal

Yang dimana tujuan fiskal ini, bertujuan untuk menambah penerimaan dari negara untuk pembiayaan peran yang di lakukan dalam masa perang, belanja negara akan meningkat drastis, terutama untuk pembiayaan militer, logistik, rekonstruksi, serta pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, adanya suatu kebijakan pada tarif juga dapat berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang cepat dan efektif. Pungutan dari tarif atas barang impor juga dapat langsung masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan perang, tanpa harus melalui proses penggalangan dana internal yang lebih panjang seperti pajak domestik.

3. Tujuan strategis

Yang ketiga ialah tujuan strtaegis, yang dimana tujuan ini dapat di lakukan sebagai suatu alat tekanan ekonomi yang di lakukan terhadap negara musuh, yang dimana tarif ini bisa dapat digunakan sebagai bagian dari perang ekonomi, yang memiliki tujuan untuk melemahkan kekuatan lawan. Dengan menaikkan tarif terhadap barang dari negara musuh atau sekutunya, suatu negara dapat merusak akan suatu keseimbangan terhadap perdagangan lawan, mengganggu rantai pasok mereka, dan memicu instabilitas ekonomi. Langkah ini kadang dilakukan bersamaan dengan embargo dan pembatasan ekspor komoditas penting. Tujuannya ini ialah guna menciptakan tekanan ekonomi yang dapat

memaksa lawan melemah atau tunduk tanpa perlu konfrontasi militer yang dilakukan secara langsung. Dalam banyak kasus, perang tarif juga menjadi salah satu bagian dari konflik asimetris, di mana negara yang lebih kecil atau sedang mencoba untuk mengimbangi tentang kekuatan ekonomi dan militer negara yang lebih besar melalui kebijakan perdagangan yang agresif.

4. Tujuan politik

Tujuan yang terakhir ini ialah tujuan politik, yang dimana memiliki tujuan guna meningkatkan daya tawar dalam negosiasi internasional, yang dimana kebijakan tarif ini sering sekali di gunakan untuk memperkuat posisi tawar suatu negara dalam diplomasi internasional, terutama dalam masa perang atau dalam menjelang konflik bersenjata. Negara dapat mengancam atau menerapkan tarif tinggi sebagai bentuk tekanan agar pihak lain dapat bersedia untuk bernegosiasi, atau dapat mengubah kebijakan luar negeri mereka

Dengan demikian, kebijakan tarif dalam konteks perang ini, bukan hanya merupakan suatu alat ekonomi biasa, akan tetapi juga menjadi suatu strategi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, militer, dan ideologis. Tujuan utamanya ialah untuk dapat memperkuat daya tahan ekonomi domestik, membiayai perang, melemahkan musuh secara ekonomi, meningkatkan posisi tawar diplomatik, dan juga guna memperkuat kohesi sosial-politik dalam negeri. Dalam praktiknya, suatu kebijakan tarif juga sering juga menjadi pembuka dari perang dagang yang kemudian telah berkembang menjadi suatu konflik ekonomi yang lebih luas, dan bahkan bisa memicu atau memperpanjang konflik bersenjata antarnegara.

Kebijakan tarif dapat diberlakukan oleh negara yang terlibat

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh salah satu negara yang terlibat dalam perang dunia ini memiliki suatu dampak yang sangat besar terhadap sektor industri dan perdagangan internasional. Dalam konteks perang dunia, kebijakan tarif ini tidak hanya digunakan sebagai suatu instrumen ekonomi aja, akan tetapi juga sebagai bagian dari strategi besar dalam menghadapi konflik global. Negara yang berperang, terutama pada negara besar yang memiliki kekuatan industri dan militer yang signifikan, yang dimana dengan menggunakan tarif sebagai suatu alat untuk dapat mempengaruhi alur perdagangan internasional, menekan ekonomi musuh, dan juga guna memperkuat ketahanan industri domestik mereka.

Dalam kondisi perang, negara biasanya memberlakukan tarif yang sangat tinggi terhadap barang impor dari negara lawan atau dari negara yang dianggap mendukung pihak musuh. Ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar, khususnya terhadap salah satu produk yang memiliki nilai strategis seperti bahan baku industri militer, teknologi tinggi, energi, dan kebutuhan pokok. Dengan menaikkan tarif impor, negara juga dapat memaksa masyarakat dan pelaku industri untuk beralih ke produk lokal, sekaligus guna mengurangi aliran devisa ke negara musuh.

Ini menjadi bagian dari upaya guna melemahkan perekonomian lawan yang dilakukan secara tidak langsung, yang dikenal sebagai economic warfare atau perang ekonomi. Dalam sektor industri, kebijakan tarif semacam ini, memiliki tujuan guna mendorong percepatan produksi dalam negeri. Pemerintah biasanya memberikan insentif kepada sektor industri lokal agar dapat memproduksi barang substitusi impor dengan lebih cepat dan juga efisien. Industri yang dilakukan secara strategis seperti industri logam, tekstil, senjata, makanan, dan farmasi akan dapat diberikan proteksi yang sangat tinggi dengan melalui tarif impor yang besar terhadap barang sejenis dari luar negeri.

Proteksi ini memiliki tujuan agar industri dalam negeri tidak kalah bersaing dan juga mampu memenuhi permintaan domestik yang dapat meningkatkan tajam selama masa

perang. Dalam beberapa kasus, negara juga dapat mengkombinasikan tarif dengan kebijakan larangan impor total atau dalam pembatasan kuota untuk memperketat akses pasar terhadap barang asing. Sementara itu, dalam sektor perdagangan internasional, kebijakan tarif yang diterapkan selama perang dunia ini juga dapat menyebabkan terganggunya sistem perdagangan global.

Negara yang terlibat dalam konflik akan membentuk blok perdagangan tertutup atau hanya berdagang dengan negara sekutu. Akibatnya, jalur distribusi barang akan merasakan terganggu, biaya logistik akan meningkat, dan harga barang internasional juga menjadi melonjak. Negara yang netral akan menjadi mitra dagang kedua belah pihak, dan juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru, karena mereka pastinya akan terkena dampak dari kebijakan tarif, embargo, maupun blokade ekonomi. Bahkan negara yang tidak secara langsung terlibat dalam perang pun bisa terkena dampak negatif akibat disrupsi perdagangan global yang dipicu oleh perang tarif.

Dengan jangka panjang, kebijakan tarif dalam masa perang juga dapat menciptakan fragmentasi dalam sistem perdagangan internasional. Perdagangan yang sebelumnya memiliki sifat yang terbuka dan kompetitif, kini menjadi tertutup dan sangat dipengaruhi oleh aliansi politik dan militer. Negara akan lebih cenderung mengutamakan perdagangan bilateral dengan negara sekutu yang dapat dipercaya, ketimbang dengan melakukan perdagangan bebas multilateral. Hal ini dapat mengurangi efisiensi global dan menurunkan volume perdagangan internasional yang dilakukan secara keseluruhan.

Bahkan setelah perang usai, warisan dari kebijakan tarif yang proteksionis ini juga seringkali tetap membekas dalam bentuk sistem perdagangan yang lebih tertutup dan penuh kecurigaan. Dengan demikian, kebijakan tarif dalam konteks perang dunia memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi arah dan struktur industri serta perdagangan internasional. Penerapan tarif yang tinggi dan selektif pun menjadi salah satu bagian dari strategi besar negara untuk bertahan dan menang dalam konflik, tidak hanya dengan melalui kekuatan militer saja, akan tetapi juga dengan mengendalikan arus barang, modal, dan sumber daya secara global.

Kebijakan ini dapat mencerminkan bahwa dalam situasi ekstrem seperti melakukannya perang, instrumen ekonomi ini digunakan secara maksimal untuk dapat melayani terhadap kepentingan keamanan dan kedaulatan bagi negara.

Peran pemerintah dalam kebijakan tarif pada masa perang dunia

Peran pemerintah dalam kebijakan tarif pada masa perang dunia ini sangat krusial karena menyangkut kepada suatu kestabilan ekonomi, ketahanan nasional, serta strategi kemenangan jangka panjang. Dalam situasi perang, pemerintah tidak bisa bersikap pasif, justru harus tampil sebagai aktor utama dalam merancang, dan juga mengawasi kebijakan tarif yang dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh. Peran yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya ialah :

1. Pertama, pemerintah harus menetapkan kebijakan tarif yang selektif dan juga strategis. Artinya, tarif yang dikenakan bukan memiliki sifat yang umum atau sembarangan, akan tetapi juga dapat ditujukan khusus pada sektor atau negara tertentu yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan mempengaruhi akan keberlangsungan perang. Misalnya, pemerintah perlu menaikkan tarif pada barang dari negara musuh untuk membatasi akses terhadap pasar dalam negeri. Sebaliknya, untuk negara sekutu atau yang bersikap netral, tarif bisa dapat diturunkan atau dibebaskan demi kelancaran kerja sama strategis.
2. Kedua, pemerintah harus melakukan identifikasi terhadap sektor industri domestik yang vital dan rentan terhadap persaingan pada produk asing. Pemerintah perlu memberi

proteksi dengan melalui tarif yang tinggi terhadap suatu barang impor yang dapat melemahkan industri strategis nasional, seperti industri logam, pertanian, senjata, farmasi, energi, dan teknologi. Tindakan ini bukan hanya untuk menjaga kestabilan ekonomi saja, akan tetapi juga untuk mendukung logistik perang dan menjamin tersedianya suplai domestik selama konflik berlangsung.

3. Ketiga, peran pemerintah juga dapat mencakup pengawasan yang ketat terhadap suatu pelaksanaan tarif dan pengendalian perdagangan yang dilakukan secara ilegal. Dalam masa perang, potensi penyelundupan, dan perdagangan gelap ini akan mengalami peningkatan yang sangat pesat, di karena adanya kelangkaan barang. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat lembaga bea cukai, memperketat pengawasan yang berada di pelabuhan dan perbatasan, serta memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran tarif

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam kebijakan tarif pada masa perang ini sangatlah sentral. Pemerintah dapat bertindak sebagai suatu perancang strategi, pelaksana kebijakan, pengawas implementasi, pelindung industri, komunikator terhadap kebijakan publik, dan juga sekaligus sebagai negosiator internasional. Semua langkah ini harus dilakukan secara terpadu untuk memastikan bahwa kebijakan tarif ini, tidak hanya menjadi instrumen ekonomi saja, akan tetapi juga sebagai suatu senjata yang sangat strategis untuk mendukung tujuan besar untuk mempertahankan kedaulatan, memperkuat daya tahan nasional, dan memenangkan perang.

KESIMPULAN

Kebijakan terhadap tarif dalam konteks kepentingan ekonomi dan strategi perang ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi negara, terutama saat menghadapi situasi konflik yang berskala global seperti perang dunia. Tarif tidak lagi sekadar menjadi salah satu alat untuk mengatur arus barang dan juga mempengaruhi harga saja, akan tetapi berubah menjadi instrumen negara untuk melindungi kepentingan nasional dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, militer, dan diplomasi. Dalam situasi perang, tarif diberlakukan secara selektif dan menyorot pada salah satu produk dari negara musuh untuk dapat melemahkan kekuatannya, serta guna mengurangi ketergantungan terhadap produk luar, khususnya pada barang yang strategis seperti bahan baku militer, energi, dan kebutuhan pokok.

Tujuan utama dari kebijakan tarif dalam masa perang ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Secara ekonomi, tarif memiliki tujuan untuk membantu memperkuat sektor produksi domestik dan mempercepat substitusi impor. Dari sisi fiskal, tarif menjadi sumber pemasukan negara yang signifikan untuk membiayai perang dan mendukung kebutuhan logistik. Secara strategis, tarif juga berfungsi sebagai bentuk tekanan terhadap negara lawan, menciptakan ketidakseimbangan dalam perdagangan musuh, serta dapat memaksa mereka untuk melemah tanpa harus melakukan konfrontasi bersenjata yang dilakukan secara langsung.

Dari sisi politik dan diplomatik, kebijakan tarif juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya tawar negara dalam negosiasi internasional, terutama untuk menggali dukungan atau dapat memaksa perubahan sikap negara lain. Dalam praktiknya, kebijakan tarif selama perang dunia ini sangat memengaruhi arah dan struktur industri serta perdagangan internasional. Negara yang terlibat konflik lebih cenderung menutup pasar mereka dan hanya berdagang dengan negara sekutu, yang mengakibatkan terganggunya sistem perdagangan global, dan juga melonjaknya harga barang internasional.

Bahkan negara yang tidak secara langsung terlibat dalam perang pun ikut terdampak

karena disrupsi jalur distribusi dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam jangka waktu yang panjang, kebijakan tarif yang proteksionis juga dapat meninggalkan warisan yang berupa sistem perdagangan yang tertutup dan penuh kecurigaan, yang dapat bertahan bahkan setelah perang berakhir. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat sentra, yang dimana pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan saja, akan tetapi juga sebagai pelaksana, pengawas, dan komunikator terhadap kebijakan tarif. Pemerintah harus mampu menetapkan tarif yang dilakukan secara strategis dan perdagangan ilegal, serta dapat menjalin kerja sama pada perdagangan dengan negara sahabat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebijakan tarif sebagai bagian dari upaya guna mempertahankan kedaulatan negara.

Semua langkah ini harus dilakukan secara terkoordinasi agar kebijakan tarif benar-benar menjadi senjata strategis dalam mempertahankan dan memenangkan perang. Dengan demikian, kebijakan tarif dalam masa perang dunia merupakan salah satu bagian integral dari strategi pertahanan nasional yang dilakukan secara menyeluruh. Dengan melalui pendekatan ekonomi yang dapat dikombinasikan dengan kepentingan politik dan militer ini, tarif menjadi suatu alat yang sangat efektif untuk memperkuat ketahanan negara, menjaga stabilitas industri dalam negeri, serta melemahkan kekuatan musuh secara sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum terhadap penelitian.. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134
- Basu Swastha .2002. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, Edisi Bahasa Indonesia terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, SH, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Kuntowijoyo. 2006. Kebudayaan dan masyarakat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sirdjosisworo Soedjono.2001. Pengantar ilmu tentang hukum Jakarta. PT Grafindo.